

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan  
di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Adinda Tiara Putri

No Mahasiswa : 20313446

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2024

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan  
di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Adinda Tiara Putri  
Nomor Mahasiswa : 20313446  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2024

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2024  
Penulis,



Adinda Tiara Putri

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan  
di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022

Nama : Adinda Tiara Putri  
Nomor Mahasiswa : 20313446  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Suharto S.E., M.Si.

# PENGESAHAN UJIAN

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

### SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022

Disusun oleh : ADINDA TIARA PUTRI

Nomor Mahasiswa : 20313446

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 05 Juni 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Prof. Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D



Mengetahui  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

## HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

*(Q.S Al – Insyirah ayat 5-6)*

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ، بَثِّرُوا وَلَا تُثَبِّرُوا

"Permudahlah, jangan dipersulit  
berilah kabar gembira, jangan ditakut-takuti"

*(HR. Bukhari dan Muslim)*

“Maka barang kali saat ini Allah tengah berbicara pada kita lewat fase yang saat ini kita sedang hadapi. Allah menjaga jantung kita agar terus berdetak sekalipun kita merasa dunia telah berhenti bagi kita bahkan disaat kita merasa sendiri, kasih Allah tidak pernah putus”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemudahan yang Ia berikan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Neneng Susilawati yang senantiasa selalu mendoakan untu kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi yang hangat, menjadi suatu kebanggaan memiliki ibu yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita dan Bapak Iwan Kusnindar (Alm) untuk ayahku semoga kita dapat bertemu kembali di Surga-Nya kelak.
2. Regi Rahmat Wijaya Saputra dan Kayla Arafah Kusnindar Putri selaku kakak dan adikku yang selalu memberikan support, motivasi dan hiburan dengan canda tawa melalui hal-hal yang tidak biasa.
3. Teruntuk orang-orang terdekat yang berada dalam lingkungan kehidupan saya yang selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, saya mengucapkan terimakasih banyak atas doa, semangat, dan kebersamaannya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam perjalanan hidup kalian.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022”. Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan dan petunjuk dari beberapa pihak, saya mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran untuk skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yaitu:

1. Ayah, Mama, A Regi dan de ila yaitu keluargaku yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk doa maupun motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Suharto, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang memberikan saran dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh dosen dan karyawan jurusan ekonomi pembangunan yang telah membekali ilmu dan membangun karakter mahasiswa.
6. Teman – teman dekat saya Tiara Anggari, Iznadiar Azkiani, Tiara Endriani, Ismi Rizki, Selvy Majdina, Windy Lonia, Rezal Fitriana, Amelia Suprianingtias, Imeilia Indah, Niken Berlianti, Ria Tri, Sakinah Kusuma, Lutfah Putri, Maya Dwi, Alfi Nur, Ajeng Safitri, Dea Putri, dan Tania Nurani yang telah menemani saya di sela-sela waktu kesibukan yang tiada

hentinya, saya selalu bersyukur dikelilingi oleh orang – orang baik dan hebat seperti kalian.

7. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2020, Srikandi UII, Himpunan Jurusan Ilmu Ekonomi UII, Lembaga Eksekutif Mahasiswa FBE UII, IBC UII, Rakernas, dan KKN unit 520 Desa Kedungjambal yang memberikan saya pengalaman yang begitu berwarna selama saya memasuki dunia perkuliahan.

Hidup akan selalu berjalan, orang akan selalu tergantikan, tapi kenangan tidak akan pernah lupa bahwa kita pernah bersama. Semoga segala sesuatu kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan ibadah untuk kita semua, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Oleh karena itu, saya akan mengakhiri kata pengantar ini dengan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak dan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan baik dari penulis maupun dari penulisan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	10
1.3    Tujuan Penelitian.....	10
1.4    Manfaat Penelitian .....	10
1.5    Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1    Landasan Teori.....	12
2.2    Kajian Pustaka .....	19
2.3    Kerangka Berpikir.....	22
2.4    Hipotesis Penelitian .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	23
3.1.    Jenis dan Sumber Data.....	23
3.2.    Variabel Penelitian .....	23
3.3.    Metode Analisis Data .....	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	26
4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	26
4.2 Analisis Regresi Data Panel .....	28
4.3 Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel .....	29
4.4 Hasil Uji dan Analisis data .....	31
4.5 Hasil Interpretasi .....	33
BAB V .....	35
5.1 Kesimpulan .....	35
5.2 Implikasi .....	36
DAFTAR PUSTAKA .....	37
LAMPIRAN .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Gini Ratio Semester 2 (September)
Tabel 1.2	Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Tabel 1.3	RDDF di Kawasan Barat Indonesia
Tabel 1.4	Peringkat nilai rasio derajat desentralisasi fiskal antar provinsi tahun
Tabel 1.5	Penduduk Miskin di Kawasan Barat Indonesia
Tabel 1.6	Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat Indonesia
Tabel 1.7	Produk Domestic Regional Bruto di Kawasan Barat Indonesia
Tabel 2.2	Tabel kajian pustaka
Tabel 3.1	Analisis Deskriptif
Tabel 3.2	Tabel Definisi Variabel
Tabel 4.2.1	<i>Regresi Common Effect Model (CEM)</i>
Tabel 4.2.2	<i>Regresi Fixed Effect Model (FEM)</i>
Tabel 4.2.3	<i>Regresi Random Effect Model (REM)</i>
Tabel 4.3.1	<i>Uji Chow</i>
Tabel 4.3.2	<i>Uji LM-Test</i>
Tabel 4.3.3	<i>Uji Hausman</i>
Tabel 4.3.4	Tabel Model Terbaik

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Kurva Lorenz

Gambar 2.1.2 Kurva Kuznet

Gambar 2.3 Bagan Hipotesis pemikiran

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Gini Rasio, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB
- Lampiran 2. Data perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
- Lampiran 3. *Common Effect Model*
- Lampiran 4. *Fixed Effect Model*
- Lampiran 5. *Random Effect Model*

## ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kemiskinan. Ketimpangan yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia lebih tinggi dibandingkan Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan estimasi data panel dengan pendekatan *fixed effect model*. Variabel pendukung yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan PDRB di Kawasan Barat Indonesia Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan variabel penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia.

Kata Kunci: *Ketimpangan pendapatan, rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, PDRB.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah umum di negara sedang berkembang adalah dalam kemiskinan. Kemiskinan terdiri dari dua jenis, yakni, pertama adalah menyangkut jumlah masyarakat yang masih hidup berada di bawah garis atau disebut kemiskinan absolut dan ketimpangan pendapatan antar individu atau disebut kemiskinan relatif (Desfaryani *et al.*, 2020). Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat umum adalah tujuan utama setiap negara terutama kepada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan hidup di bawah garis kemiskinan (Saleh & Sumarsono, 2015) atau meningkatkan kesejahteraan khalayak melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara, pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial (Hartini, 2017).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki persoalan-persoalan yang saling berkaitan antara aspek ekonomi dan non-ekonomi (Saleh & Sumarsono, 2015). Menurut Brodjonegoro (2021) Pengembangan konsep pembangunan perlu memperhatikan dimensi regional terutama yang berkaitan dengan *regional equality* dan *spatial distribution of resources*. Diketahui bahwa negara Indonesia bersifat kepulauan (*archipelagic state*) sehingga memiliki perbedaan karakteristik pada setiap wilayahnya yang akan mempengaruhi terhadap pola pembangunan ekonomi dan dapat diidentifikasi melalui tiga konteks utama, yaitu Jawa dan luar Jawa, Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, serta desa dan kota (Latifah, 2018). Pada setiap pembangunan akan terjadi besarnya ketimpangan antar wilayah, khususnya pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Kawasan Barat Indonesia (KBI) terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Salah satu permasalahan yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia adalah disparitas pendapatan dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia (Rosmeli dan Nurhayani, 2014). Tingginya tingkat disparitas pendapatan menyebabkan ketidakmerataan pemasukan di kalangan masyarakat di kawasan ini. Ketika perbedaan tersebut terus meningkat, ketidakseimbangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah akan semakin besar (Amri, 2017). Kesenjangan dalam proses pembangunan menjadi salah satu faktor yang menunjukkan adanya ketimpangan. Beberapa wilayah mungkin mengalami pertumbuhan yang signifikan, sementara wilayah lain tidak demikian (Khairul & Lak Lak, 2023). Dalam mengukur disparitas pendapatan antar provinsi dapat menggunakan Gini rasio, pada saat nilai koefisien gini di suatu provinsi bernilai tinggi maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketimpangan di provinsi tersebut begitupun sebaliknya (Abdul & Diana 2022).

**Tabel 1.1** Gini Ratio Provinsi Kawasan Barat Indonesia Semester 2 (September) Tahun 2018 – 2022

Provinsi	Gini Rasio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Aceh	0.318	0.321	0.319	0.323	0.291
Provinsi Sumatera Utara	0.311	0.315	0.314	0.313	0.326
Provinsi Sumatera Barat	0.305	0.307	0.301	0.3	0.292
Provinsi Riau	0.347	0.331	0.321	0.327	0.323
Provinsi Jambi	0.335	0.324	0.316	0.315	0.335
Provinsi Sumatera Selatan	0.341	0.339	0.338	0.34	0.33
Provinsi Bengkulu	0.355	0.329	0.323	0.321	0.315
Provinsi Lampung	0.326	0.331	0.32	0.314	0.313
Provinsi Kep. Bangka Belitung	0.272	0.262	0.257	0.247	0.255
Provinsi Kep. Riau	0.339	0.337	0.334	0.339	0.325
Provinsi DKI Jakarta	0.39	0.391	0.4	0.411	0.412
Provinsi Jawa Barat	0.405	0.398	0.398	0.406	0.412
Provinsi Jawa Tengah	0.357	0.358	0.359	0.368	0.366
Provinsi DI Yogyakarta	0.422	0.428	0.437	0.436	0.459
Provinsi Jawa Timur	0.371	0.364	0.364	0.364	0.365
Provinsi Banten	0.367	0.361	0.365	0.363	0.377
Provinsi Bali	0.364	0.37	0.369	0.375	0.362
Indonesia	0.384	0.38	0.385	0.381	0.381

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara tabel Kawasan Barat Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 memberikan gambaran gini ratio yang beragam. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa gini rasio terbesar berada di angka 0.4 dengan provinsi tercatat memiliki nilai ketimpangan tertinggi dari tahun ke tahun adalah DI Yogyakarta sebesar 0.459 dan diikuti oleh kedua

provinsi dengan nilai yang sama yaitu provinsi DKI Jakarta dan provinsi Jawa Barat dengan nilai 0.412 lalu Provinsi Banten sebesar 0.377. Pulau Jawa menjadi pulau yang memiliki ketimpangan tertinggi dan terbanyak, hal ini disebabkan oleh perkembangan aktivitas perekonomian di berbagai kota besar memiliki nilai pendapatan perkapita yang tinggi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pada aktivitas ekonomi.

Permasalahan terkait dengan desentralisasi fiskal terdiri dari dua bagian yaitu pertama ketidaksesuaian program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga perlu adanya sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang kedua terdapat kesenjangan dalam pembangunan antar daerah. Ketimpangan pendapatan dapat berdampak terhadap inefisiensi ekonomi dan melemahkan stabilitas solidaritas sosial. (Todaro, 2003). Menurut Aditya (2020) salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara adalah desentralisasi fiskal. Pada tahun 2022 Alokasi anggaran ke daerah mencapai sekitar 31,50% atau 1/3 bagian dari APBN (Kemenkeu, 2022). Alokasi diberikan melalui transfer ke daerah untuk dikelola agar pembangunan di daerah dapat beriringan dengan pembangunan pada pemerintah pusat. Konsep desentralisasi fiskal direncanakan untuk peningkatan stabilitas ekonomi daerah dan menyeimbangkan distribusi pendapatan baik secara vertikal maupun horizontal. (Kusumaningtyas, 2022). Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal salah satu Rasio keuangan (*financial ratio*) yang dapat digunakan pemerintah untuk menilai kondisi kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Berikut kategori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggunakan acuan dari (Purba & Hubarat, 2017).

**Tabel 1.2** Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Interval	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00%	Sangat Kurang
10,02-20,00%	Kurang
20,01-30,00%	Cukup
30,01-40,00%	Sedang
40,01-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Kusumaningtyas, 2022 dalam Purba dan Hutabarat, 2017

Penerimaan pendapatan daerah dengan nilai PAD lebih besar dari total pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah > TPD) menunjukkan kemampuan suatu provinsi dapat membiayai kemampuan keuangannya sendiri dan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

**Tabel 1.3.** RDDF Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022

Provinsi	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal		
	PAD	Dana Perimbangan	RDDF (%)
Provinsi Aceh	2,610,421,330,811	6,978,936,430,469	37.40
Provinsi Sumatera Utara	6,118,440,141,749	6,894,344,974,387	88.75
Provinsi Sumatera Barat	2,452,492,221,180	3,846,108,097,415	63.77
Provinsi Riau	3,855,523,999,802	4,933,726,773,667	78.15
Provinsi Jambi	1,769,972,026,839	2,779,671,896,129	63.68
Provinsi Sumatera Selatan	3,838,808,087,808	5,570,034,089,154	68.92
Provinsi Bengkulu	896,822,807,599	1,900,839,655,363	47.18
Provinsi Lampung	3,130,512,333,031	3,046,699,241,791	102.75
Provinsi Kep. Bangka Belitung	869,363,302,786	1,665,030,639,992	52.21
Provinsi Kep. Riau	1,355,922,083,001	2,356,218,769,370	57.55
Provinsi DKI Jakarta	42,732,800,690,588	18,156,389,110,667	235.36
Provinsi Jawa Barat	20,598,473,288,981	14,259,998,075,885	144.45
Provinsi Jawa Tengah	14,555,625,261,023	10,716,829,169,701	135.82
Provinsi DI Yogyakarta	2,032,915,980,774	2,825,352,245,636	71.95
Provinsi Jawa Timur	19,200,344,229,778	13,295,114,523,380	144.42
Provinsi Banten	6,894,298,613,370	4,024,985,137,034	171.29
Provinsi Bali	3,558,278,317,345	2,485,049,549,708	143.19

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan otonomi daerah, derajat desentralisasi fiskal merupakan aspek yang sangat penting, menjadi sumber pendanaan pembangunan pemerintah daerah, dengan melihat dari nilai RDDF di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022 berdasarkan tabel 1.3 yaitu sebagian wilayah memiliki total pendapatan daerah lebih besar dibanding dengan pendapatan asli daerah (TPD > PAD) sedangkan sebagian wilayah lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki total pendapatan daerah lebih kecil dibanding dengan pendapatan asli daerah (TPD < PAD). DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai RDDF tertinggi selama 5 tahun yaitu mencapai 235.36% dan disusul oleh provinsi Banten yaitu sebesar 144.42%. Artinya baru sebagian kecil di Kawasan Barat Indonesia yang bisa membiayai kemampuan keuangan daerahnya sendiri.

**Tabel 1.4.** Peringkat nilai rasio derajat desentralisasi fiskal antar provinsi tahun 2018-2022

Nama Provinsi	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
Tertinggi		
DKI Jakarta	235.36%	Sangat baik
Terendah		
Aceh	37.40%	Cukup

Sumber: diolah menggunakan perhitungan RDDF

Provinsi di pulau Jawa memiliki kemampuan meningkatkan keuangan daerah dengan sangat baik berdasarkan tabel 1.4. bahwa semua provinsi di pulau Jawa masuk ke dalam golongan >50.00% yang artinya memiliki kemampuan untuk membiayai keuangannya sendiri dan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Provinsi dengan nilai terendah yaitu Aceh dan Bengkulu masuk ke dalam golongan 30,01-40,00% (sedang) menunjukkan provinsi tersebut memiliki ketergantungan terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Waluyo, 2007) dengan judul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia Tahun 2001-2005” hasil dari penelitian tersebut bahwa desentralisasi fiskal akan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara daerah-daerah di pulau Jawa dengan pulau luar Jawa dan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dan penelitian tersebut didukung oleh

penelitian (Atikah & Ike, 2010) dengan judul “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia” hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Tetapi hal ini dibantah dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Ezcurra dan Pascual, 2006) dengan judul “Fiscal Decentralization and Regional Disparities: Evidence from Several European Union Countries” mengatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki korelasi negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

**Tabel 1.5.** Penduduk miskin di Kawasan Barat Indonesia 2018-2022

Provinsi	Penduduk Miskin
	(ribuan jiwa)
Provinsi Aceh	822.98
Provinsi Sumatera Utara	1.300.472
Provinsi Sumatera Barat	351.092
Provinsi Riau	492.078
Provinsi Jambi	281.408
Provinsi Sumatera Selatan	1076.41
Provinsi Bengkulu	301.984
Provinsi Lampung	1.059.274
Provinsi Kep. Bangka Belitung	70.506
Provinsi Kep. Riau	137.65
Provinsi DKI Jakarta	444.698
Provinsi Jawa Barat	3.840.3
Provinsi Jawa Tengah	3.912.504
Provinsi DI Yogyakarta	469.1
Provinsi Jawa Timur	4.323.592
Provinsi Banten	754.612
Provinsi Bali	181.692

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini mencerminkan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita/bulan di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Berdasarkan tabel 1.5 diatas pada tahun 2018-2020 rata-rata penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi sebanyak 43.23.592

ribu jiwa dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan penduduk miskin terendah sebanyak 70.506 ribu jiwa. Perkembangan penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih cepat dibandingkan dengan penduduk miskin di daerah pedesaan. Menurut (Todaro, 2000) Adanya peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Pertambahan jumlah penduduk akan berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Desfaryani *et al*, 2020) dengan judul penelitian “Distribusi Pendapatan Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas” dengan hasil penelitian ketimpangan pendapatan penduduk miskin berada pada kategori rendah.

**Tabel 1.6** Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat Indonesia

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia
	(%)
Provinsi Aceh	72.01
Provinsi Sumatera Utara	71.88
Provinsi Sumatera Barat	72.48
Provinsi Riau	72.92
Provinsi Jambi	71.39
Provinsi Sumatera Selatan	70.11
Provinsi Bengkulu	71.41
Provinsi Lampung	69.73
Provinsi Kep. Bangka Belitung	71.47
Provinsi Kep. Riau	75.63
Provinsi DKI Jakarta	80.95
Provinsi Jawa Barat	72.20
Provinsi Jawa Tengah	71.93
Provinsi DI Yogyakarta	80.07
Provinsi Jawa Timur	71.77
Provinsi Banten	72.58
Provinsi Bali	75.56

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ketimpangan yang

terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pengukuran tingkat kesejahteraan dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu pada bidang kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Belum meratanya pembangunan dapat terlihat dari rendah atau tingginya indeks pembangunan manusia yang berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah indeks pembangunan manusia maka tingkat produktivitas penduduk rendah yang akan mempengaruhi kepada pendapatan, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan tabel 1.6 Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta unggul dalam Indeks pembangunan manusia dengan masing masing nilai 80.95 dan 80.07. Nilai IPM di setiap Provinsi Pulau Jawa menunjukkan nilai yang cenderung tinggi. Nilai IPM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan artinya kualitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Perbedaan tingkat IPM yang berbeda di setiap provinsi dapat membuat IPM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017). Menurut Becker (dalam Solihin, 1995) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi

**Tabel 1.7** PDRB di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022

Provinsi	PDRB menurut harga berlaku
	(Miliar)
Provinsi Aceh	176368.904
Provinsi Sumatera Utara	833454.408
Provinsi Sumatera Barat	251337.55
Provinsi Riau	814145.568
Provinsi Jambi	227780.396
Provinsi Sumatera Selatan	482221.244
Provinsi Bengkulu	76304.218
Provinsi Lampung	365495.658
Provinsi Kep. Bangka Belitung	81136.98
Provinsi Kep. Riau	271002.918
Provinsi DKI Jakarta	2855388.116
Provinsi Jawa Barat	2158666.234
Provinsi Jawa Tengah	1391150.008
Provinsi DI Yogyakarta	144823.196
Provinsi Jawa Timur	2404054.664
Provinsi Banten	662823.002
Provinsi Bali	235125.18

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.7 PDRB dengan nilai tertinggi didominasi oleh pulau jawa yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 2855388.116, provinsi Jawa Timur sebesar 2404054.664 dan provinsi Jawa Barat sebesar 2158666.234 sedangkan PDRB terendah yaitu provinsi Bengkulu sebesar 76304.218. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas merupakan matlamat dari sebuah pertumbuhan ekonomi. Kuznet (1955) mengemukakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yaitu terjadinya dua ketimpangan yang akan menunjukkan pertumbuhan lalu akan mengalami penurunan, keadaan ini dikenal sebagai hipotesis “U” terbalik. Ketidakseimbangan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika hanya mengandalkan kekuatan mekanisme pasar untuk itu kebijakan ekonomi perlu reformasi kebijakan terutama dalam hal kerangka kerja ekonomi makro untuk mendorong ekonomi yang kokoh (Nadya & Syafri, 2019). Ketimpangan wilayah akan cenderung meningkat akan tetapi apabila pembangunan berlanjut terus dan mobilitas modal serta tenaga kerja telah lancar, barulah ketimpangan wilayah mulai berkurang. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan regional akan berkurang seperti huruf “U” terbalik.

Berdasarkan determinan di atas tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berada pada tingkat yang tinggi, dapat diketahui bahwa ketimpangan tidak dapat dihilangkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut dapat dipertahankan selama pertumbuhannya (Aufa *et al*, 2019 dalam supriyantoro 2005). Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi perlu dilakukan kegiatan pembangunan ekonomi daerah yang mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata antar daerah (Kuncoro, 2002). Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Menurut Fauza (2019) distribusi pendapatan yang merata dapat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat di satu wilayah. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian analisis pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada prosesnya permasalahan ketimpangan di Indonesia melalui proses yang cukup panjang, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi ketimpangan yaitu melalui otonomi daerah, peretasan penduduk miskin, kualitas penduduk dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

1. Bagaimana pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Penduduk Miskin terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengidentifikasi terhadap fenomena yang sedang diteliti:

1. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Penduduk Miskin Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis, selama proses penulisan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan serta memberikan pemahaman bagi penulis tentang bagaimana

pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat Indonesia.

2. Bagi Peneliti lain, Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi serta informasi sebagai perkembangan penelitian.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini data menjadi bahan masukan untuk evaluasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan atau aturan dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima tahapan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisikan uraian latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori dan Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian sebagai dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian disertai kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan jenis dan sumber data, variabel penelitian dan metode analisis data, dan persamaan pada model penelitian.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan analisis statistik deskriptif, analisis regresi, pemilihan model terbaik regresi, hasil analisis data dan interpretasi.

5. Bab V Kesimpulan dan Implikasi

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan perolehan pendapatan yang ada di masyarakat (Damanik *et al.*, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan salah satunya adalah gini rasio. Gini rasio merupakan ukuran mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Gini rasio dirumuskan sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=100}^n f_{pi}(Fc_i + Fc_{i-1})$$

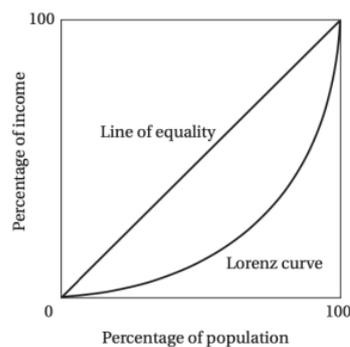
GR = Gini Rasio

$f_{pi}$  = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$Fc_i$  = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

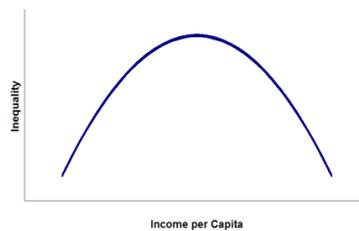
$Fc_{i-1}$  = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke  
i-1

Teori yang mendasari pengukuran ketimpangan adalah teori kurva Lorenz, kurva yang menggambarkan ukuran dari distribusi pendapatan dari pemerataan yang sempurna (Todaro & Smith, 2012:206) dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (pemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz.



**Gambar 2.1.1** Kurva Lorenz

Pada kurva Lorenz sumbu horizontal merupakan persentase kumulatif penduduk (penerima upah), sementara sumbu vertikal menunjukkan persentase kumulatif dari total pendapatan (Armstrong et al., 1977:408). Keseimbangan distribusi pendapatan terjadi pada titik 45 derajat pada kurva Lorenz, yang mengartikan bahwa setiap keluarga atau perorangan memiliki pendapatan yang sama setiap tahunnya (Nafziger, 2005:179). Namun, semakin jauh garis Lorenz dari line of equality semakin melebar ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro & Smith, 2012:207)



**Gambar 2.1.2** Kurva Kuznet

Teori Kuznet menjelaskan bahwa tahapan awal pertumbuhan akan memperlihatkan kondisi distribusi pendapatan yang buruk dan pada tahapan selanjutnya akan membaik (Todaro & Smith, 2012:224). Kurva Kuznet merupakan kurva “U terbalik” dimana menunjukkan deret waktu perubahan dalam distribusi pendapatan yang diukur dengan menggunakan koefisien gini. Pertumbuhan ekonomi pada tahap awal memperlihatkan kondisi distribusi pendapatan yang buruk dapat terlihat pada kurva Kuznet, hal tersebut karena berhubungan dengan perubahan struktur. Sektor industri modern menjadi sektor yang terkonsentrasi pada tahap awal, saat lapangan kerja terbatas namun tingkat produktivitas tinggi akibat adanya perubahan ekonomi tradisional ke ekonomi modern.

Tanpa disadari ketimpangan pendapatan bergandengan erat dengan bentuk ketimpangan lain antara lain perbedaan akses dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang termanifestasi sebagai ketimpangan kesempatan (Yumna et al., 2017). Bentuk ketimpangan lain akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengganggu upaya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu yang bisa mempengaruhi ketimpangan yaitu, perbedaan dalam penggunaan pendapatan. Ketimpangan dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah anggota keluarga

yang dibiayai, dimana keluarga dari kalangan miskin cenderung memiliki anak yang lebih banyak. Pada saat kondisi suatu negara yang berkembang menjadi lebih mapan, maka kondisi angka kelahiran cenderung lebih menurun dan mempengaruhi ketimpangan seiring perubahan waktu. Penurunan jumlah keluarga miskin yang lebih cepat dibandingkan dengan keluarga kaya tanpa adanya perubahan pendapatan maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (World Bank, 2016)

### **2.1.2 Desentralisasi Fiskal**

Landasan hukum yang mengatur tentang penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas dari otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum dalam implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Sebagai wujud implementasi desentralisasi fiskal yaitu dengan mengalokasikan sumber-sumber pendanaan bagi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui belanja transfer ke daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Penetapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dengan diberikannya wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya baik dari sisi pendapatan maupun pengeluarannya. Kebijakan tersebut apabila dilihat dari penggunaannya menekan anggaran pada sisi pengeluaran. Peran pemerintah daerah tidak hanya mengelola keuangan pada sisi pengeluaran tetapi dapat mengelola keuangan dari sisi pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah.

### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, pemerintah pusat dapat menilai kesiapan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah melalui kebijakan fiskal yang tergambar dalam rasio derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal yang tinggi mengindikasikan pemerintah daerah telah mampu meningkatkan PAD dibandingkan pendapatan lain pada pendapatan daerah.

Jika rasio PAD tinggi Pengukuran rasio derajat desentralisasi fiskal melalui sisi pengeluaran maupun penerimaan (Mahi dan Supriyanti, 2019). Dalam penelitian ini, kapasitas kemampuan fiskal dari masing-masing provinsi dicerminkan melalui sisi penerimaan.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDDF)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemasukan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah, dan hasil pendapatan lainnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Perkembangan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan APBD dapat menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Peningkatan pengelolaan APBD harus terpelihara pengelolaan dan pembiayaannya agar dapat melaksanakan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

### **2. Total Penerimaan Daerah atau Dana Perimbangan**

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **A. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dana alokasi umum dihitung berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Penyempurnaan Kebijakan dana alokasi umum untuk memperkuat pengalokasian untuk menurunkan ketimpangan fiskal antar daerah (*Horizontal imbalance*) hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum lebih memihak kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah (BKF, 2021).

## **B. Dana Alokasi Khusus**

Dana transfer khusus ditransfer dari pusat ke daerah untuk mendanai kegiatan khusus atau kegiatan tertentu milik daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. Dana transfer khusus bersifat mengatasi *horizontal imbalance* melalui pembiayaan belanja daerah dari pemerintah pusat dengan bantuan-bantuan bersyarat di sektor program prioritas sebagai percepatan pembangunan daerah. Pada tahun 2016 perkembangan dana alokasi khusus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan diikuti dengan perluasan rincian komponen dari sisi jenis maupun bidang, perluasan tersebut adalah:

- a. Komponen dana alokasi khusus yang berasal dari transfer daerah
  1. DAK sesuai format tahun 2015; dan
  2. Dana transfer lainnya, yaitu dana bantuan operasional sekolah, dana tambahan penghasilan guru PNSD, dana tunjangan profesi guru PNSD dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi.
- b. Komponen dana alokasi khusus yang semula berasal dari belanja pemerintah pusat
  1. Dana bantuan operasional kesehatan
  2. Dana bantuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
  3. Dana peningkatan kapasitas koperasi, UKM, dan ketenagakerjaan

Di dalam Undang-Undang HKPD, dana alokasi khusus dibagi berdasarkan jenisnya, terdiri dari:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik);
2. Dana Alokasi Khusus Non fisik (DAK Non fisik); dan
3. Hibah kepada Daerah

## **C. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi

Hasil digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*). Kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan penerimaan riil memberi ketidakpastian kepada penerimaan daerah karena pemerintah pusat tidak secara tetap memberikan dana ini.

### **2.1.3 Penduduk Miskin**

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (BPS). Dalam Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum (Annur, 2018).

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

### **2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut (BPS, 2022) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah dimensi capaian pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,

serta standar hidup yang layak. Berikut adalah 4 komponen dasar untuk menghitung kualitas hidup, yaitu:

1. Bidang kesehatan yang mencakup capaian umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*) Umur panjang dan hidup sehat dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir
2. Bidang pendidikan yang mencakup pengetahuan (*knowledge*) didasarkan angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah.
3. kemampuan standar hidup layak (*decent standard of living*) diukur dengan pengeluaran per kapita Berdasarkan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) terhadap sejumlah kebutuhan pokok sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak

#### **2.1.5 PDRB**

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh komponen nilai tambah bruto dan sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah dari lapangan usaha.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik Menurut dari beberapa ahli ekonom pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang menghasilkan tenaga kerja dan berperan dalam penambahan jumlah produksi, baik sektor jasa maupun barang modal. Namun menurut teori Robert Malthus apabila pertumbuhan penduduk berlebihan, mengakibatkan tenaga kerja yang melimpah sehingga terjadi penurunan tingkat upah dan menyebabkan perekonomian terhambat.

Sukirno (2013) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu menghasilkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah persentase kenaikan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

## 2.2 Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa peneliti terdahulu yang dijadikan landasan atau kajian pustaka sebagai acuan diantaranya, yaitu:

**Tabel 2.2** Tabel kajian pustaka

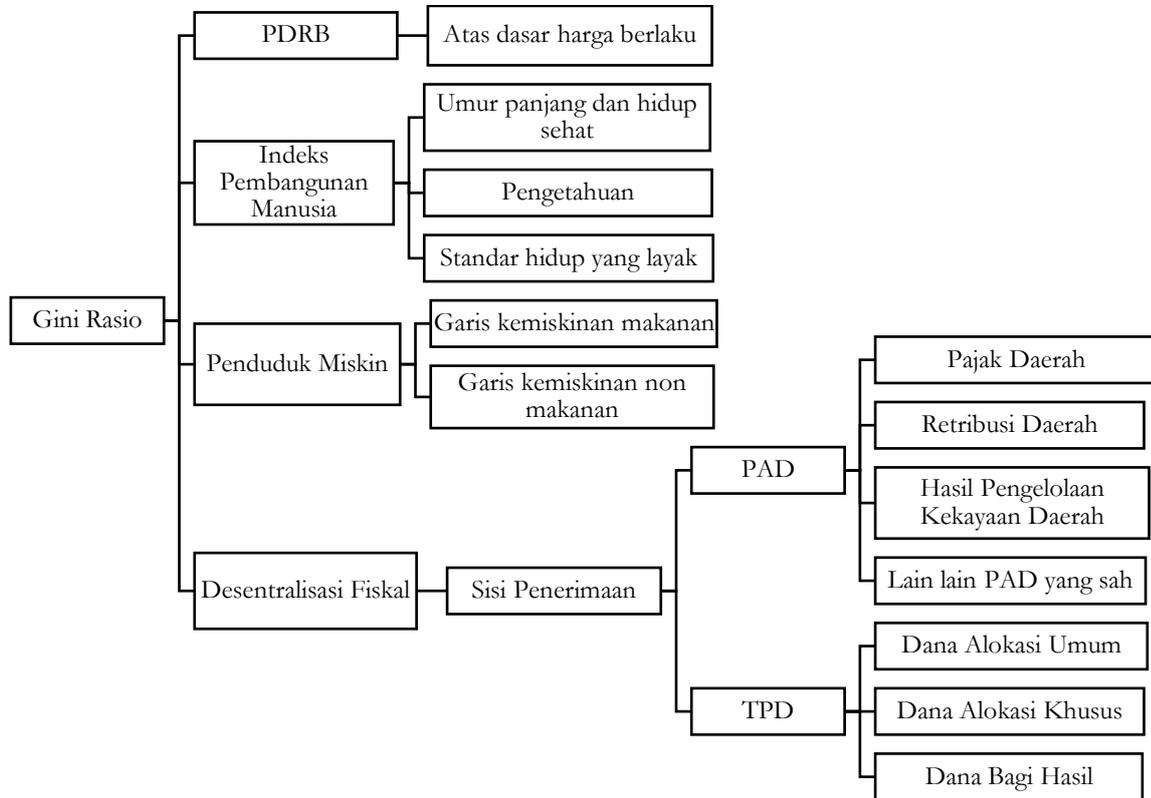
Nama Peneliti	Judul	Model Regresi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Puteri, (2022)	Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2020	Regresi data panel ( <i>fixed effect</i> )	PDRB, TPT dan Pendidikan berpengaruh negatif. Pengeluaran pemerintah dan Jumlah penduduk berpengaruh positif.	Persamaan: Tujuan analisis terhadap ketimpangan Pendapatan. Dan terdapat variabel independen yang sama yaitu PDRB Perbedaan: variabel yang digunakan yaitu TPT, pendidikan, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk
Rosmeli dan Nurhayati (2014)	Studi Komparatif Ketimpangan Wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia	Regresi <i>time series</i>	Adanya ketimpangan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Tenaga kerja di kedua kawasan perlu ditingkatkan.	Persamaan: Tujuan analisis terhadap ketimpangan wilayah antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur. Perbedaan: Metode penelitian dan variabel yang digunakan yaitu tenaga kerja.

Aditya (2020)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Pendekatan kuantitatif asosiatif	Derajat Desentralisasi Fiskal dan PDRB berpengaruh negatif  Total populasi dan Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh positif	Persamaan: Tujuan analisis terhadap ketimpangan Pendapatan. Dan terdapat variabel independen yang sama yaitu DDF dan PDRB.  Perbedaan: Variabel yang digunakan total populasi dan indeks demokrasi indonesia. Dan metode penelitian yang digunakan.
Kusumangtyas, (2022)	Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020	Regresi data panel ( <i>fixed effect</i> )	Rasio derajat desentralisasi fiskal dan tenaga kerja berpengaruh positif  Jumlah penduduk dan investasi berpengaruh negatif.	Persamaan: Terdapat variabel independen yang sama yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal  Perbedaan: Tujuan analisis
Desfaryani, Humaidi dan Fitri (2020)	Distribusi Pendapatan Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas	Metode Survei	Ketimpangan pendapatan penduduk miskin berada pada kategori rendah	Persamaan: Tujuan analisis terhadap ketimpangan Pendapatan. Dan terdapat variabel independen yang sama penduduk miskin  Perbedaan:

				Metode penelitian yang digunakan.
Fatika (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa	Regresi data panel ( <i>fixed effect</i> )	Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif.	Persamaan: Tujuan analisis terhadap ketimpangan Pendapatan. Dan terdapat variabel independen yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM  Perbedaan: Variabel yang digunakan yaitu TPT
Wibowo (2016)	Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap	Metode survei	Selama dua dasawarsa ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami peningkatan	Persamaan: Tujuan analisis terhadap ketimpangan Pendapatan.  Perbedaan: Metode penelitian yang digunakan.
Hartini (2017)	Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Provinsi Diy Tahun 2011-2015	Regresi data panel ( <i>fixed effect</i> )	PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan  Investasi dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	Persamaan: Tujuan analisis terhadap ketimpangan Pendapatan. Serta variabel PDRB dan IPM.  Perbedaan: Variabel investasi

### 2.3 Kerangka Berpikir

Berikut merupakan bagan hipotesis pemikiran yang digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1** Bagan Hipotesis pemikiran

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, kajian pustaka dan kerangka berpikir, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia pada tahun 2018-2022.
2. Penduduk miskin berpengaruh positif terhadap terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia pada tahun 2018-2022.
3. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia pada tahun 2018-2022.
4. Produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia pada tahun 2018-2022.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari PPID Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia dan serta ditunjang melalui studi kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data penelitian ini merupakan data panel yaitu gabungan data cross section sebanyak 17 provinsi dengan time series dari tahun 2018-2022.

### 3.2. Variabel Penelitian

Berikut merupakan variabel yang digunakan penelitian ini:

**Tabel 3.1** Variabel Penelitian

Model	Variabel	Ukuran	Sumber
$\beta 1RDDFit$	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	PAD terhadap total penerimaan daerah	DJPK, Kemenkeu
$\beta 2JPit$	Penduduk Miskin	Penduduk miskin yang dikategorikan	BPS
$\beta 3IPMit$	Indeks Pembangunan Manusia	Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup Layak	BPS
$\beta 4PDRBit$	PDRB	PDRB atas dasar harga berlaku	BPS
$GRit$	Ketimpangan Pendapatan	Gini rasio	BPS

Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan. Fungsi dari penelitian ini :

$$Gini_{it} = f(RDDFit, PM_{it}, IPMit, PDRBit)$$

Persamaan yang akan diestimasi dengan model regresi adalah:

$$Y_{Gini} = \beta_0 + \beta_1 RDDFit + \beta_2 PMit + \beta_3 IPMit + \beta_4 PDRBit + \varepsilon_{it}$$

### 3.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan metode regresi data panel melalui pengolahan program Eviews 12. Metode data panel merupakan metode gabungan antara cross-section dan time series. Penggabungan antara keduanya akan membentuk data panel dalam jangka waktu tertentu.

#### 3.3.1. Regresi Data Panel

Tiga pendekatan dalam estimasi regresi data panel, yaitu:

1. *Common effect Model* (CEM) pendekatan gabungan data tanpa mempertimbangkan perbedaan waktu dan perbedaan individu. Diasumsikan bahwa data tetap konsisten dalam berbagai periode waktu.
2. *Fixed effect Model* (FEM) Dalam setiap subjek FEM memiliki intersep yang dapat berbeda, sementara kemiringannya tetap sama. Variabel dummy dapat digunakan untuk memperhitungkan intersep yang berbeda.
3. *Random effect Model* (REM) adanya error dalam waktu antar variabel sehingga model ini perlu memasukan variabel dummy untuk mewakili ketidaktahuan atas model sebenarnya.

#### 3.3.2. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam menentukan model pengelolaan data panel yang tepat ada 3 pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Uji Chow digunakan dalam menentukan model yang tepat antara *fixed effect model* dengan *common effect model* dalam mengestimasi data panel.  
 $H_0$  : CEM merupakan model terbaik.  
 $H_a$  : FEM merupakan model terbaik.
2. Uji Hausman dalam menentukan model yang tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model* dalam mengestimasi data panel.  
 $H_0$  : REM merupakan model terbaik.  
 $H_a$  : FEM merupakan model terbaik.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM) dalam menentukan model yang tepat antara *random effect model* dan *common effect model*. Pengujian ini didasarkan pada nilai chi-square dengan degree of freedom sebesar sejumlah variabel independen.

H<sub>0</sub> : CEM merupakan model terbaik.

H<sub>a</sub> : REM merupakan model terbaik.

### 3.3.3. Pengujian Statistik

Dalam pengujian statistik akan dilakukan beberapa uji, yaitu :

1. Uji Kelayakan Model (Uji F) yaitu menguji hipotesis koefisien regresi (slope) secara bersamaan untuk menentukan kesesuaian model yang dipilih layak atau tidak. Apabila nilai probabilitas  $F \leq 0.05$  atau 5% artinya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara keseluruhan.
2. Uji Hipotesis Signifikan (Uji T) merupakan kemampuan model dalam menjelaskan secara individu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan kemampuan model dalam mengukur variasi variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Nilai determinasi koefisien antara nol hingga 1. Semakin tinggi nilai koefisien maka semakin tinggi kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel independen mengenai variabel yang diteliti.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis deskriptif, memaparkan hasil regresi, interpretasi dari masing-masing hasil taksiran koefisien regresi, uji hipotesis berdasarkan hasil tersebut, dan pembahasan.

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ditujukan untuk menyampaikan informasi tanpa hasil uji yang telah dilakukan dengan melihat nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Data penelitian yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan data cross section sebanyak 17 provinsi dan data time series dari tahun 2018-2022.

**Tabel 4.1.** Analisis Deskriptif

	GR	RDDF	PM	IPM	PDRB
<i>Mean</i>	0.345247	103.3952	1199.604	73.18259	790075.2
<i>Median</i>	0.338000	79.93000	661.3600	72.16000	356676.8
<i>Maximum</i>	0.459000	315.3500	4572.730	81.65000	3188539.0
<i>Minimum</i>	0.247000	21.92000	66.78000	69.02000	66402.99
<i>Std. Dev.</i>	0.042621	59.65627	1362.800	3.112994	863136.9
<i>Observations</i>	85	85	85	85	85

Sumber: data diolah menggunakan *Eviews 12*.

#### 4.1.1 Variabel GR

Variabel GR atau gini rasio sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Koefisien gini atau gini rasio bernilai antara 0 hingga 1. Pada saat koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna dan koefisien gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Hasil dari analisis statistik deskriptif di atas Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai gini rasio yang tertinggi sebesar 0.46 sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai gini rasio terendah sebesar 0.25 dengan nilai rata-rata gini rasio di Kawasan Barat Indonesia sebesar 0.34.

#### 4.1.2 Variabel RDDF

Variabel RDDF atau rasio derajat desentralisasi fiskal sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Variabel rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100$$

Hasil dari analisis statistik deskriptif di atas Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai rasio derajat desentralisasi fiskal tertinggi sebesar 315.3% dan Provinsi Aceh memiliki nilai rasio derajat desentralisasi fiskal terendah sebesar 21.92% dengan nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal di Kawasan Barat Indonesia sebesar 103.4%.

#### 4.1.3 Variabel PM

Variabel PM atau Penduduk Miskin sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Variabel Penduduk miskin didapat dari total keseluruhan penduduk yang dikategorikan miskin. Hasil dari analisis statistik deskriptif di atas Provinsi Jawa Timur memiliki nilai penduduk miskin tertinggi sebanyak 4.572.730 ribu jiwa dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki penduduk miskin terendah sebanyak 66.78 ribu jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk miskin di Kawasan Barat Indonesia sebesar 1.199.604 ribu jiwa.

#### 4.1.4 Variabel IPM

Variabel IPM atau indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Variabel indeks pembangunan manusia menggunakan base umur harapan hidup saat lahir (UHH) hasil SP2010. Hasil dari analisis statistik deskriptif di atas Provinsi DKI Jakarta indeks pembangunan manusia tertinggi sebesar 81.65% dan Provinsi Lampung memiliki indeks pembangunan manusia terendah sebesar 69.02% dengan nilai rata-rata indeks pembangunan manusia di Kawasan Barat Indonesia sebesar 73.18%.

#### 4.1.5 Variabel PDRB

Variabel PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga berlaku. Hasil dari analisis statistik deskriptif di atas Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB tertinggi sebesar 3188539.02 miliar dan Provinsi Bengkulu memiliki PDRB terendah sebesar 66402.99 miliar dengan nilai rata-rata PDRB di Kawasan Barat Indonesia sebesar 790075.2 miliar.

#### 4.2 Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis data dilakukan dengan tiga metode yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* sebagai berikut:

##### 4.2.1 *Common Effect Model*

**Tabel. 4.2.1** Regresi *Common Effect Model* (CEM) tahun 2018-2022

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.456687	0.080996	-5.638393	0.0000
RDDDF	0.000155	6.94E-05	2.228334	0.0287
PM	2.01E-05	3.17E-06	6.341861	0.0000
IPM	0.010561	0.001119	9.437859	0.0000
PDRB	-1.39E-08	6.12E-09	-2.277249	0.0254

Sumber: data diolah menggunakan *Eviews 12*

Didapat hasil regresi dari tabel 4.2.1 sebagai berikut:

$$Gini_{it} = 0.456687 + 0.000155RDDDF_{it} + 0.00000201PM_{it} + 0.010561IPM_{it} - 0.00000000139PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

##### 4.2.2 *Random Effect Model*

**Tabel. 4.2.2** Regresi *Random Effect Model* (REM) tahun 2018-2022

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.228871	0.118112	1.937752	0.0562
RDDDF	1.08E-05	3.82E-05	0.282429	0.7783
PM	7.38E-06	5.30E-06	1.392380	0.1677
IPM	0.001324	0.001630	0.812261	0.4191
PDRB	1.21E-08	8.96E-09	1.344913	0.1825

Sumber: data diolah menggunakan *Eviews 12*

Didapat hasil regresi dari tabel 4.2.2 sebagai berikut:

$$Gini_{it} = 0.228871 + 0.000000108RDDDF_{it} + 0.000000738PM_{it} + 0.001324IPM_{it} + 0.00000000121PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

### 4.2.3 *Fixed Effect Model*

**Tabel. 4.2.3** Regresi *Fixed Effect Model* (FEM) tahun 2018-2022

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.939668	0.174568	5.382813	0.0000
RDDDF	2.94E-05	4.06E-05	0.724240	0.4716
PM	1.79E-05	9.92E-05	1.806215	0.0756
IPM	-0.008902	0.002506	-3.552780	0.0007
PDRB	4.11E-08	1.49E-08	2.760208	0.0075

Sumber: data diolah menggunakan *Eviews 12*

Didapat hasil regresi dari tabel 4.2.3 sebagai berikut:

$$Gini_{it} = 0.939668 + 0.00000294RDDFit + 0.00000179PMit - 0.008902IPMit - 0.00000000411PDRBit + \epsilon it$$

## 4.3 Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel

### 4.3.1 Uji Chow

Uji Chow untuk menilai model terbaik antara *common effect model* dan *fixed model effect*.

**Tabel 4.3.1** Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	41.869667	(16,64)	<b>0.0000</b>
Cross-section Chi-Square	207.358323	16	0.0000

Sumber: data diolah dengan *Eviews 12*

$H_0 = \text{Common Effect Model}$  terbaik

$H_a = \text{Fixed Effect model}$  terbaik

Berdasarkan dari hasil F-Test didapatkan nilai prob Cross-section F sebesar  $0.0000 < 0.01$  ( $\alpha = 1\%$ ) sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* merupakan pilihan terbaik.

### 4.3.2 LM-Test

LM-Test untuk menilai model terbaik antara *common effect model* dan *random effect model*

**Tabel 4.3.2** Uji LM-Test

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	90.69756 (0.0000)	1.017651 (0.3131)	91.71522 ( <b>0.0000</b> )

Sumber: data diolah dengan *Eviews* 12

$H_0 = \text{Common Effect Model}$  terbaik

$H_a = \text{Random Effect Model}$  terbaik

Berdasarkan dari hasil LM Test didapatkan nilai P-Value Breusch-Pagan Cross-section sebesar  $0.0000 < 0.01$  ( $\alpha = 1\%$ ) sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , Maka dapat disimpulkan bahwa *random effect model* merupakan pilihan terbaik.

### 4.3.3 Hausman Test

Hausman Test untuk menilai model terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model*.

**Tabel 4.3.3** Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob
Cross-section	36.383799	4	<b>0.0000</b>

Sumber: data diolah dengan *Eviews* 12

$H_0 = \text{Random Effect Model}$  terbaik

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$  terbaik

Berdasarkan dari hasil Hausman Test didapatkan nilai prob Cross-section sebesar  $0.0000 < 0.01$  ( $\alpha = 1\%$ ) sehingga menolak  $H_0$  dan  $H_a$ , Maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* merupakan pilihan terbaik.

#### 4.4 Hasil Uji dan Analisis data

Beberapa model dilakukan untuk dilakukan regresi dari hasil pengolahan menggunakan *E-views* 12 didapatkan *Fixed Effect Model* menjadi pilihan terbaik.

**Tabel 4.3.4** Tabel Model Terbaik

Variabel	FE		
	Coef	T-stat	Prob
C	0.939668	5.382813	0.0000
RDDDF	2.94E-05	0.724240	0.4716
PM**	1.79E-05	1.806215	0.0756
IPM*	-0.008902	-3.552780	0.0007
PDRB*	4.11E-08	2.760208	0.0075
Effects Specification			
Cross-section			
R-Squared	0.972150		
F-statistic	111.7023		
Prob(F-statistic)	0.000000		
T-tabel $\alpha = 1\%$	2.681		
T-tabel $\alpha = 10\%$	1.782		

Sumber: Data yang diolah dengan *Eviews* 12.

Keterangan :

\*) Signifikan pada  $\alpha < 1\%$

\*\*\*) Signifikan pada  $\alpha < 10\%$

##### 4.4.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan nilai prob (F-Stat) sebesar  $0.000000 < \alpha = 1\%$  sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  dapat diartikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

##### 4.4.2 Uji Parsial (Uji T)

###### a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$H_0$  : Variabel RDDDF tidak berpengaruh terhadap variabel gini rasio

$H_a$  : Variabel RDDDF berpengaruh terhadap variabel gini rasio

Hasil Uji T variabel RDDDF sebesar  $0.724 < 1.782$  dan didapatkan nilai P-value sebesar  $0.4716 > 0.10$  ( $\alpha = 10\%$ ) sehingga gagal menolak  $H_0$  artinya

variabel RDDF tidak berpengaruh terhadap variabel gini rasio.

**b. Penduduk Miskin**

$H_0$  : Variabel Penduduk Miskin tidak berpengaruh terhadap variabel gini rasio

$H_a$  : Variabel Penduduk Miskin berpengaruh terhadap variabel gini rasio

Hasil Uji T variabel Penduduk Miskin sebesar  $1.806 > 1.782$  dan Didapatkan nilai P-value sebesar  $0.0756 < 0.10$  ( $\alpha = 10\%$ ) sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  artinya variabel Penduduk Miskin berpengaruh terhadap variabel gini rasio.

**c. Indeks Pembangunan Manusia**

$H_0$  : Variabel IPM tidak berpengaruh terhadap variabel gini rasio

$H_a$  : Variabel IPM berpengaruh terhadap variabel gini rasio

Hasil Uji T variabel IPM sebesar  $-3.552 < 2.681$  dan Didapatkan nilai P-value sebesar  $0.0007 < 0.01$  ( $\alpha = 1\%$ ) sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  artinya variabel IPM berpengaruh terhadap variabel gini rasio.

**d. PDRB**

$H_0$  : Variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap variabel gini rasio

$H_a$  : Variabel PDRB berpengaruh terhadap variabel gini rasio

Hasil Uji T variabel PDRB sebesar  $2.76 > 2.681$  dan Didapatkan nilai P-value sebesar  $0.0075 < 0.01$  ( $\alpha = 1\%$ ) sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  artinya variabel PDRB berpengaruh terhadap variabel gini rasio.

**4.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Diperoleh nilai R-Squared sebesar 0.972150 dapat disimpulkan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan PDRB mampu menjelaskan variabel gini rasio sebesar 97,21% sedangkan sisanya sebesar 2.79% dijelaskan di luar model.

## **4.5 Hasil Interpretasi**

### **4.5.1 Pengaruh variabel rasio derajat desentralisasi fiskal dengan rasio**

Hasil pengujian menunjukkan pada tahun 2018 hingga 2022 rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aditya, 2020) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tidak baik dapat berpengaruh atas tidak signifikannya rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap gini rasio di daerah. Sejalan dengan itu, Musgrave (1959) dalam bukunya yang berjudul “*Theory of Public Finance – A Study in Public Economy*” menyatakan bahwa fungsi dari stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan menjadi efektif jika pelaksanaannya dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal karena tidak berpengaruh terhadap gini rasio.

### **4.5.2 Pengaruh variabel penduduk miskin dengan rasio gini**

Hasil pengujian pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa penduduk miskin berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Pada saat penduduk miskin naik sebesar satu ribu jiwa maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar  $1.79E-05$  atau  $0.00000179\%$ . Menurut Todaro (2000), pertumbuhan populasi mempengaruhi antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan. Penduduk miskin cenderung terkena dampak negatif dari penambahan populasi, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Kondisi ekonomi keluarga yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan karena sebagian besar keluarga miskin memiliki banyak anggota keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal karena berpengaruh positif terhadap gini rasio.

#### **4.5.3 Pengaruh variabel indeks pembangunan manusia dengan rasio gini**

Hasil pengujian pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Pada saat indeks pembangunan manusia naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan akan turun 0.0089%. Hal ini selaras dengan teori *human capital*, mengemukakan bahwa pendidikan mempengaruhi disparitas pendapatan karena peran pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. menunjukkan peningkatan indeks pembangunan manusia dapat mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal karena berpengaruh negatif terhadap gini rasio.

#### **4.5.4 Pengaruh variabel PDRB dengan rasio gini**

Hasil pengujian pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Pada saat PDRB naik sebesar satu miliar maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 4.11E-08 atau 0.00000000411%. Teori Kuznet menyatakan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan lan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan teori *trickle down effect*, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan ada bagian pertumbuhan ekonomi tersebut yang menetes ke bawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal karena berpengaruh positif terhadap gini rasio.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan dari analisis determinan ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2018-2022 tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia.
2. Penduduk miskin pada tahun 2018-2022 berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia.
3. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2018-2022 berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia.
4. PDRB pada tahun 2018-2022 berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan analisis regresi yang telah di paparkan pada Bab VI, indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien terbesar dibandingkan dengan variabel lain sehingga memiliki kontribusi terbesar terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pemerintah harus berfokus kepada program-program dan kebijakan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Kementerian Keuangan. (2022). APBN Kita
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia
- Mujiwardhani, Alfian., Setiawan Lisno dan Nawawi Ahmad. (2022). Dana Alokasi Khusus di Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Salih, M. & Sumarsono, Sonny (2015). Pengantar Ekonomi Makro. UPT Penerbitan Universitas Jember
- Todaro. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Eka, Rizky & Prapanca, Detak (2019). Buku Ajar Ekonomi Pembangunan. UMSIDA Press
- Lestari, Aisha, Oktapianti, Oktariani dan Noviarita. 2021. Teori Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, (2)2: 113-128
- Brodjonegoro, Bambang. (2021). Peranan Ekonomi Geografi dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 12-21.
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 1(1), 1-11.
- Puteri, A. C. (2022). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan 33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2020. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 12-21.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243-258.
- Rosmeli, R., & Nurhayani, N. (2014). Studi komparatif ketimpangan Wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 3(1), 456-463.

- Musgrave Richard A. (1959). *Theory of Public Finance: a Study in Public Economy*.
- Ezcurrea, R., & Pascual, P. (2008). Fiscal decentralization and regional disparities: evidence from several European Union countries. *Environment and Planning A*, 40(5), 1185-1201.
- Aditya, S. E. (2020). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Ridho, M. A. M. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 2022: 71-81.
- Kusumaningtyas, N. (2022). Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Desfaryani, R., Humaidi, E., & Fitri, A. (2020). Distribusi Pendapatan Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(3), 641–646.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- SMERU Research Institute. 2016. Penetapan Kriteria dan variabel pendataan penduduk miskin yang komprehensif dalam rangka perlindungan penduduk miskin di Kabupaten/Kota. Kertas Kerja SMERU
- Santoso, R. P. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Subroto, G. (2014). Hubungan Pendidikan dan Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris. *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, 20(3), 390-405.
- Salsabila, N. A., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *EKOM4: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 436-445.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh pdrb per kapita, investasi dan ipm terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi diy tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(6), 530-539.
- Mahardiki, D., & Santoso, R. P. (2013). Analisis perubahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Indonesia 2006-2011. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 6(2).
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. P. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi

- Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.
- Waluyo, Joko., Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia Tahun 2001-2005. Laporan penelitian. UPN Veteran Yogyakarta.
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25-31.
- Zumaeroh, Z., Zuhanea, F., Wahyuningsih, E. S., Danuta, K. S., Adhitya, B., & Purnomo, S. D. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Barat Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2), 347-356.
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15-25.
- Armstrong, D. E., Friesen, P. H., & Miller, D. (1977). The measurement of income distribution in Canada: Some problems and some tentative data. *Canadian Public Policy/Analyse de Politiques*, 479-488.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Data Gini Rasio, Rasio Desentralisasi Fiskal, Penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB

<b>Provinsi</b>	<b>Tahun</b>	<b>GR</b>	<b>RDDF</b>	<b>PM</b>	<b>IPM</b>	<b>PDRB</b>
Provinsi Aceh	2018	0.318	63.16	839.49	71.19	155910.977
Provinsi Aceh	2019	0.321	57.52	819.44	71.9	164162.9782
Provinsi Aceh	2020	0.319	60.34	814.91	71.99	166372.3207
Provinsi Aceh	2021	0.323	21.92	834.24	72.18	184979.8786
Provinsi Aceh	2022	0.291	27.07	806.82	72.8	210418.3589
Provinsi Sumatera Utara	2018	0.311	79.93	1324.98	71.18	741347.43
Provinsi Sumatera Utara	2019	0.315	78.91	1282.04	71.74	799608.9542
Provinsi Sumatera Utara	2020	0.314	75.28	1283.29	71.77	811188.3088
Provinsi Sumatera Utara	2021	0.313	85.16	1343.86	72	859934.2624
Provinsi Sumatera Utara	2022	0.326	138.25	1268.19	72.71	955193.0927
Provinsi Sumatera Barat	2018	0.305	57.88	357.13	71.73	230367.222
Provinsi Sumatera Barat	2019	0.307	57.82	348.22	72.39	245949.7372
Provinsi Sumatera Barat	2020	0.301	56.34	344.23	72.38	241894.1277
Provinsi Sumatera Barat	2021	0.3	62.58	370.67	72.65	253100.1965
Provinsi Sumatera Barat	2022	0.292	89.34	335.21	73.26	285376.461
Provinsi Riau	2018	0.347	75.37	500.44	72.44	752263.0662
Provinsi Riau	2019	0.331	69.27	490.72	73	760247.5089
Provinsi Riau	2020	0.321	63.29	483.39	72.71	727599.4727
Provinsi Riau	2021	0.327	76.07	500.81	72.94	839002.4126

Provinsi Riau	2022	0.323	114.19	485.03	73.52	991615.3798
Provinsi Jambi	2018	0.335	60.34	281.69	70.65	207878.6943
Provinsi Jambi	2019	0.324	57	274.32	71.26	216927.7082
Provinsi Jambi	2020	0.316	53.88	277.8	71.29	205081.9924
Provinsi Jambi	2021	0.315	64.01	293.86	71.63	232294.1549
Provinsi Jambi	2022	0.335	85.61	279.37	72.14	276719.4378
Provinsi Sumatera Selatan	2018	0.341	63.99	1068.27	69.39	419392.1567
Provinsi Sumatera Selatan	2019	0.339	61.32	1073.74	70.02	453402.7141
Provinsi Sumatera Selatan	2020	0.338	57.84	1081.59	70.01	454607.3961
Provinsi Sumatera Selatan	2021	0.34	67.66	1113.76	70.24	493636.8548
Provinsi Sumatera Selatan	2022	0.33	96.87	1044.69	70.9	590067.1016
Provinsi Bengkulu	2018	0.355	59.01	301.81	70.64	66402.99305
Provinsi Bengkulu	2019	0.329	39.82	302.3	71.21	72098.24045
Provinsi Bengkulu	2020	0.323	35.27	302.58	71.4	73305.26704
Provinsi Bengkulu	2021	0.321	47.64	306	71.64	79602.64399
Provinsi Bengkulu	2022	0.315	58.39	297.23	72.16	90111.94704
Provinsi Lampung	2018	0.326	101.7	1097.05	69.02	332446.0707
Provinsi Lampung	2019	0.331	114.88	1063.66	69.57	356676.8284
Provinsi Lampung	2020	0.32	115.45	1049.32	69.69	353025.0881
Provinsi Lampung	2021	0.314	77.2	1083.93	69.9	371198.8762
Provinsi Lampung	2022	0.313	117.93	1002.41	70.45	414131.4229
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2018	0.272	59.2	76.26	70.67	73113.28166
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2019	0.262	47.45	68.38	71.3	75794.9595
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2020	0.257	42.59	68.4	71.47	75519.77407

Provinsi Kep. Bangka Belitung	2021	0.247	51.18	72.71	71.69	85961.29042
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2022	0.255	60.89	66.78	72.24	95295.60097
Provinsi Kep. Riau	2018	0.339	53.59	131.68	74.84	248822.2331
Provinsi Kep. Riau	2019	0.337	50.98	128.46	75.48	267631.4779
Provinsi Kep. Riau	2020	0.334	52.39	131.97	75.59	254095.3463
Provinsi Kep. Riau	2021	0.339	57.17	144.46	75.79	275622.8506
Provinsi Kep. Riau	2022	0.325	74.77	151.68	76.46	308842.6775
Provinsi DKI Jakarta	2018	0.39	242.66	373.12	80.47	2592606.572
Provinsi DKI Jakarta	2019	0.391	315.35	365.55	80.76	2815636.157
Provinsi DKI Jakarta	2020	0.4	221.42	480.86	80.77	2767273.489
Provinsi DKI Jakarta	2021	0.411	183.5	501.92	81.11	2912885.342
Provinsi DKI Jakarta	2022	0.412	241.82	502.04	81.65	3188539.023
Provinsi Jawa Barat	2018	0.405	138.25	3615.79	71.3	1960627.652
Provinsi Jawa Barat	2019	0.398	144.37	3399.16	72.03	2123153.711
Provinsi Jawa Barat	2020	0.398	116.63	3920.23	72.09	2082107.257
Provinsi Jawa Barat	2021	0.406	122.45	4195.34	72.45	2204660.233
Provinsi Jawa Barat	2022	0.412	235.1	4070.98	73.12	2422782.321
Provinsi Jawa Tengah	2018	0.357	125.41	3897.2	71.12	1268261.166
Provinsi Jawa Tengah	2019	0.358	127.38	3743.23	71.73	1360960.131
Provinsi Jawa Tengah	2020	0.359	117.5	3980.9	71.87	1347222.485
Provinsi Jawa Tengah	2021	0.368	123.78	4109.75	72.16	1419735.153
Provinsi Jawa Tengah	2022	0.366	208.23	3831.44	72.79	1559571.099
Provinsi DI Yogyakarta	2018	0.422	88.06	460.1	79.53	129818.3579
Provinsi DI Yogyakarta	2019	0.428	87.3	448.47	79.99	141047.688

Provinsi DI Yogyakarta	2020	0.437	79.15	475.72	79.97	138117.8382
Provinsi DI Yogyakarta	2021	0.436	50.09	506.45	80.22	149413.6499
Provinsi DI Yogyakarta	2022	0.459	69.48	454.76	80.64	165718.4366
Provinsi Jawa Timur	2018	0.371	139.38	4332.59	70.77	2188766.345
Provinsi Jawa Timur	2019	0.364	138.63	4112.25	71.5	2345548.552
Provinsi Jawa Timur	2020	0.364	133.17	4419.1	71.71	2299807.636
Provinsi Jawa Timur	2021	0.364	124.63	4572.73	72.14	2454791.996
Provinsi Jawa Timur	2022	0.365	201.22	4181.29	72.75	2731358.776
Provinsi Banten	2018	0.367	159.09	661.36	71.95	613804.4144
Provinsi Banten	2019	0.361	168.52	654.46	72.44	661321.3407
Provinsi Banten	2020	0.365	135	775.99	72.45	625895.3836
Provinsi Banten	2021	0.363	152.15	867.23	72.72	665870.3048
Provinsi Banten	2022	0.377	273.72	814.02	73.32	747223.5797
Provinsi Bali	2018	0.364	149.1	661.36	74.77	233636.7727
Provinsi Bali	2019	0.37	157.89	654.46	75.38	251934.0978
Provinsi Bali	2020	0.369	119.7	775.99	75.5	224225.7213
Provinsi Bali	2021	0.375	111.28	867.23	75.69	220466.4298
Provinsi Bali	2022	0.362	191.47	814.02	76.44	245362.8793

**Lampiran 2.** Data perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

<b>Provinsi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>RDDE</b>
Provinsi Aceh	2018	2,359,385,393,646	3,735,791,721,607	63.16
Provinsi Aceh	2019	2,698,912,471,144	4,692,203,470,487	57.52
Provinsi Aceh	2020	2,570,775,877,183	4,260,348,704,067	60.34
Provinsi Aceh	2021	2,505,887,909,031	11,431,169,265,498	21.92
Provinsi Aceh	2022	2,917,145,003,052	10,775,168,990,686	27.07
Provinsi Sumatera Utara	2018	5,638,960,579,479	7,055,134,429,266	79.93
Provinsi Sumatera Utara	2019	5,761,270,412,051	7,300,647,588,241	78.91
Provinsi Sumatera Utara	2020	5,531,237,378,775	7,347,748,112,410	75.28
Provinsi Sumatera Utara	2021	6,402,714,086,507	7,518,180,471,987	85.16
Provinsi Sumatera Utara	2022	7,258,018,251,933	5,250,014,270,033	138.25
Provinsi Sumatera Barat	2018	2,275,090,068,587	3,930,814,210,887	57.88
Provinsi Sumatera Barat	2019	2,328,432,873,686	4,027,349,115,496	57.82
Provinsi Sumatera Barat	2020	2,255,072,985,427	4,002,468,880,936	56.34
Provinsi Sumatera Barat	2021	2,551,899,163,309	4,077,691,924,339	62.58
Provinsi Sumatera Barat	2022	2,851,966,014,893	3,192,216,355,418	89.34
Provinsi Riau	2018	3,638,995,740,121	4,827,923,284,845	75.37
Provinsi Riau	2019	3,558,210,585,340	5,136,706,027,820	69.27
Provinsi Riau	2020	3,333,176,032,498	5,266,152,834,705	63.29
Provinsi Riau	2021	4,050,468,561,143	5,324,745,236,758	76.07
Provinsi Riau	2022	4,696,769,079,910	4,113,106,484,205	114.19
Provinsi Jambi	2018	1,656,569,597,282	2,745,221,967,999	60.34

Provinsi Jambi	2019	1,651,089,944,335	2,896,753,806,401	57
Provinsi Jambi	2020	1,535,183,487,238	2,849,121,391,956	53.88
Provinsi Jambi	2021	1,843,431,186,553	2,879,979,691,030	64.01
Provinsi Jambi	2022	2,163,585,918,787	2,527,282,623,260	85.61
Provinsi Sumatera Selatan	2018	3,528,010,712,184	5,513,017,500,414	63.99
Provinsi Sumatera Selatan	2019	3,494,510,853,252	5,698,701,179,582	61.32
Provinsi Sumatera Selatan	2020	3,375,100,984,842	5,835,674,693,538	57.84
Provinsi Sumatera Selatan	2021	3,865,463,033,085	5,712,683,072,712	67.66
Provinsi Sumatera Selatan	2022	4,930,954,855,678	5,090,093,999,526	96.87
Provinsi Bengkulu	2018	872,257,738,966	1,478,045,278,636	59.01
Provinsi Bengkulu	2019	826,674,936,050	2,076,151,739,620	39.82
Provinsi Bengkulu	2020	712,345,548,602	2,019,613,689,620	35.27
Provinsi Bengkulu	2021	984,420,164,400	2,066,215,698,403	47.64
Provinsi Bengkulu	2022	1,088,415,649,978	1,864,171,870,538	58.39
Provinsi Lampung	2018	2,864,235,753,079	2,816,327,377,991	101.7
Provinsi Lampung	2019	3,018,067,291,160	2,627,195,349,110	114.88
Provinsi Lampung	2020	2,842,286,479,070	2,461,886,209,957	115.45
Provinsi Lampung	2021	3,249,669,847,265	4,209,156,682,009	77.2
Provinsi Lampung	2022	3,678,302,294,581	3,118,930,589,890	117.93
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2018	850,441,774,831	1,436,593,991,243	59.2
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2019	826,701,095,332	1,742,433,563,849	47.45
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2020	683,432,674,810	1,604,813,796,610	42.59
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2021	895,763,128,992	1,750,322,876,331	51.18
Provinsi Kep. Bangka Belitung	2022	1,090,477,839,965	1,790,988,971,927	60.89

Provinsi Kep. Riau	2018	1,220,768,246,945	2,278,002,977,357	53.59
Provinsi Kep. Riau	2019	1,311,704,305,173	2,573,155,268,205	50.98
Provinsi Kep. Riau	2020	1,195,637,693,103	2,282,262,140,222	52.39
Provinsi Kep. Riau	2021	1,375,770,280,701	2,406,531,963,533	57.17
Provinsi Kep. Riau	2022	1,675,729,889,080	2,241,141,497,534	74.77
Provinsi DKI Jakarta	2018	43,327,136,602,811	17,855,177,072,924	242.66
Provinsi DKI Jakarta	2019	45,707,400,003,802	14,494,393,043,179	315.35
Provinsi DKI Jakarta	2020	37,414,754,711,193	16,897,722,313,632	221.42
Provinsi DKI Jakarta	2021	41,606,307,405,630	22,673,794,344,052	183.5
Provinsi DKI Jakarta	2022	45,608,404,729,501	18,860,858,779,549	241.82
Provinsi Jawa Barat	2018	19,642,915,448,764	14,208,000,403,584	138.25
Provinsi Jawa Barat	2019	21,244,266,598,018	14,715,372,046,649	144.37
Provinsi Jawa Barat	2020	18,521,882,178,042	15,881,415,189,271	116.63
Provinsi Jawa Barat	2021	20,333,679,966,126	16,606,086,315,554	122.45
Provinsi Jawa Barat	2022	23,249,622,253,957	9,889,116,424,368	235.1
Provinsi Jawa Tengah	2018	13,711,836,037,849	10,933,776,831,696	125.41
Provinsi Jawa Tengah	2019	14,437,914,236,398	11,334,903,060,673	127.38
Provinsi Jawa Tengah	2020	13,668,282,278,855	11,632,787,041,293	117.5
Provinsi Jawa Tengah	2021	14,695,474,898,162	11,871,796,336,054	123.78
Provinsi Jawa Tengah	2022	16,264,618,853,852	7,810,882,578,787	208.23
Provinsi DI Yogyakarta	2018	2,040,723,348,531	2,317,436,811,403	88.06
Provinsi DI Yogyakarta	2019	2,082,795,334,435	2,385,702,912,253	87.3
Provinsi DI Yogyakarta	2020	1,876,706,829,355	2,371,044,354,021	79.15
Provinsi DI Yogyakarta	2021	1,900,923,074,881	3,794,855,660,531	50.09

Provinsi DI Yogyakarta	2022	2,263,431,316,670	3,257,721,489,974	69.48
Provinsi Jawa Timur	2018	18,531,062,021,823	13,295,784,849,272	139.38
Provinsi Jawa Timur	2019	19,327,125,485,406	13,941,687,209,995	138.63
Provinsi Jawa Timur	2020	17,950,996,508,801	13,480,111,730,763	133.17
Provinsi Jawa Timur	2021	18,935,885,925,146	15,194,249,240,653	124.63
Provinsi Jawa Timur	2022	21,256,651,207,716	10,563,739,586,218	201.22
Provinsi Banten	2018	6,329,138,234,646	3,978,289,425,586	159.09
Provinsi Banten	2019	7,022,309,916,624	4,167,138,881,097	168.52
Provinsi Banten	2020	5,906,535,160,352	4,375,121,803,580	135
Provinsi Banten	2021	7,010,370,228,687	4,607,412,424,908	152.15
Provinsi Banten	2022	8,203,139,526,542	2,996,963,150,000	273.72
Provinsi Bali	2018	3,718,499,635,346	2,493,979,973,047	149.10
Provinsi Bali	2019	4,023,156,314,135	2,548,063,873,035	157.89
Provinsi Bali	2020	3,069,474,217,923	2,564,355,199,688	119.70
Provinsi Bali	2021	3,117,070,012,474	2,801,186,284,925	111.28
Provinsi Bali	2022	3,863,191,406,848	2,017,662,417,846	191.47

### Lampiran 3. *Comman Effect Model*

Dependent Variable: Y\_GR  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/13/24 Time: 18:37  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 17  
 Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.456687	0.080996	-5.638393	0.0000
X1_RDDF	0.000155	6.94E-05	2.228334	0.0287
X2_PM2	2.01E-05	3.17E-06	6.341861	0.0000
X3_IPM	0.010561	0.001119	9.437859	0.0000
X4_PDRB	-1.39E-08	6.12E-09	-2.277249	0.0254
R-squared	0.680635	Mean dependent var	0.345247	
Adjusted R-squared	0.664667	S.D. dependent var	0.042621	
S.E. of regression	0.024681	Akaike info criterion	-4.508551	
Sum squared resid	0.048732	Schwarz criterion	-4.364866	
Log likelihood	196.6134	Hannan-Quinn criter.	-4.450757	
F-statistic	42.62435	Durbin-Watson stat	0.235841	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Lampiran 4. *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y\_GR  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 06/13/24 Time: 18:49  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 17  
 Total panel (balanced) observations: 85  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.228871	0.118112	1.937752	0.0562
X1_RDDF	1.08E-05	3.82E-05	0.282429	0.7783
X2_PM2	7.38E-06	5.30E-06	1.392380	0.1677
X3_IPM	0.001324	0.001630	0.812261	0.4191
X4_PDRB	1.21E-08	8.96E-09	1.344913	0.1825
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.024639	0.9014	
Idiosyncratic random		0.008149	0.0986	
Weighted Statistics				
R-squared	0.119284	Mean dependent var	0.050513	
Adjusted R-squared	0.075248	S.D. dependent var	0.010043	
S.E. of regression	0.009658	Sum squared resid	0.007462	
F-statistic	2.708790	Durbin-Watson stat	0.924627	
Prob(F-statistic)	0.035869			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.335469	Mean dependent var	0.345247	
Sum squared resid	0.101401	Durbin-Watson stat	0.068045	

### Lampiran 5. *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y\_GR  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/13/24 Time: 18:50  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 17  
 Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.939668	0.174568	5.382813	0.0000
X1_RDDF	2.94E-05	4.06E-05	0.724240	0.4716
X2_PM2	1.79E-05	9.92E-06	1.806215	0.0756
X3_IPM	-0.008902	0.002506	-3.552780	0.0007
X4_PDRB	4.11E-08	1.49E-08	2.760208	0.0075
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.972150	Mean dependent var	0.345247	
Adjusted R-squared	0.963447	S.D. dependent var	0.042621	
S.E. of regression	0.008149	Akaike info criterion	-6.571590	
Sum squared resid	0.004250	Schwarz criterion	-5.968112	
Log likelihood	300.2926	Hannan-Quinn criter.	-6.328854	
F-statistic	111.7023	Durbin-Watson stat	1.464843	
Prob(F-statistic)	0.000000			